

ABSTRAK

ANALISIS INTERAKSI LEVEL DOMESTIK DAN INTERNASIONAL MEMBENTUK SIKAP ARAB SAUDI TERHADAP PENUNDAAN NORMALISASI DENGAN ISRAEL, 2020—2025

Oleh

RAHMA AINI

Penundaan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel pada periode 2020–2025 menjadi menarik untuk dikaji karena di tengah tren normalisasi hubungan beberapa negara Arab melalui *Abraham Accords*, Arab Saudi justru memilih menunda normalisasi meskipun memiliki berbagai kepentingan strategis yang dapat diperoleh, seperti penguatan aliansi keamanan, dukungan agenda *Vision 2030*, serta kerja sama teknologi dan ekonomi. Penundaan tersebut menunjukkan adanya dinamika kompleks antara tekanan internasional dan pertimbangan domestik yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Saudi.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana interaksi level domestik dan internasional membentuk sikap Arab Saudi terhadap penundaan normalisasi dengan Israel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, dengan teori *Two-Level Game* sebagai landasan analisis, dan menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level domestik, penundaan normalisasi dipengaruhi oleh pertimbangan elit kerajaan, kebutuhan menjaga legitimasi Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci Islam, isu Palestina, serta opini publik yang cenderung menolak normalisasi tanpa adanya penyelesaian yang jelas bagi Palestina. Pada level internasional, Saudi menghadapi dorongan dari Amerika Serikat dan Israel, ancaman keamanan Iran, serta peluang strategis berupa kerja sama keamanan, ekonomi, dan teknologi. Namun, berbagai keuntungan tersebut belum mampu mengatasi keterbatasan pada level domestik. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan elite negara, posisi Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci Islam, peran kelompok kepentingan, serta menguatnya opini publik yang mendukung Palestina pasca-perang Gaza 2023 mempersempit ruang penerimaan (*win-set*) pemerintah terhadap normalisasi. Oleh karena itu, Penundaan ini merupakan strategi untuk menyeimbangkan kepentingan internasional dengan tuntutan domestik, bukan bentuk penolakan permanen terhadap normalisasi.

Kata Kunci: Arab Saudi, Normalisasi, Israel, *Two-Level Game*, Kebijakan Luar Negeri.

ABSTRAC

ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN DOMESTIC AND INTERNATIONAL LEVELS IN SHAPING SAUDI ARABIA'S STANCE ON THE POSTPONEMENT OF NORMALIZATION WITH ISRAEL, 2020—2025

By

RAHMA AINI

The postponement of normalization between Saudi Arabia and Israel during 2020–2025 is noteworthy because, despite the regional normalization trend initiated by the *Abraham Accords*, Saudi Arabia chose to delay normalization even though it could gain strategic benefits, including stronger security cooperation, support for *Vision 2030*, and economic and technological partnerships. This study aims to explain how domestic and international factors interacted in shaping Saudi Arabia's decision. Using an exploratory qualitative approach, this research applies the *Two-Level Game* theory and relies on secondary data. The findings show that domestic factors played a more decisive role in delaying normalization. These factors include the preferences of the royal elite, the need to maintain Saudi Arabia's legitimacy as the Custodian of the Two Holy Mosques, the Palestinian issue, and public opposition to normalization without meaningful progress toward a Palestinian settlement. At the international level, Saudi Arabia faced incentives from the United States and Israel, concerns over Iran's regional influence, and opportunities for security, economic, and technological cooperation. However, these incentives were unable to overcome domestic constraints. The study also demonstrates that the interaction between domestic and international pressures shaped Saudi Arabia's foreign policy choices. Domestic considerations narrowed the government's *win-set*, making postponement a strategy to balance international interests with domestic demands rather than a permanent rejection of normalization.

Keywords: Saudi Arabia, Normalization, Israel, *Two-Level Game*, Foreign Policy